

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PRAKTIK AKUNTANSI : STUDI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Yola Intan Pranita¹, Sinta Arjuliana², Yusmaniarti³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

yolaintan75@gmail.com, sintaarjuliana96@gmail.com, yusmaniarti@umb.ac.id

Received: 03-05-2026

Revised: 18-05-2026

Approved: 25-05-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi pada lembaga keuangan syariah serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan solusi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, dan peraturan yang relevan dengan akuntansi syariah dan lembaga keuangan syariah yang diterbitkan pada periode 2022–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi tercermin melalui penerapan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengambilan keputusan keuangan. Penerapan akuntansi syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah serta mendukung pengelolaan transaksi berdasarkan akad syariah. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, belum optimalnya regulasi dan standar akuntansi syariah, serta perkembangan teknologi digital yang memerlukan penyesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi memiliki peran penting dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan teknologi yang selaras dengan prinsip syariah untuk mendukung efektivitas penerapan akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Nilai-Nilai Islam, Lembaga Keuangan Syariah, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Praktik akuntansi syariah di Indonesia telah berkembang pesat, dan mendapat respon yang positif dari masyarakat dan pemerintah. Salah satu respon dari pemerintah adanya standar yang menjadi guidance bagi lembaga keuangan syariah. Di balik praktik akuntansi yang telah berkembang saat ini, baik akuntansi secara konvensional maupun syariah sebenarnya ada gagasan yang mendasari praktik-praktik tersebut berupa asumsi-asumsi dasar, konsep, penjelasan, deskripsi, dan penalaran yang membentuk bidang pengetahuan teori akuntansi (Sitorus & Siregar, 2022). Implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi pada lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada aspek pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga menanamkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, serta transparansi sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, Praktik akuntansi syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuangan, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan masyarakat.

Gagasan yang melandasi praktik akuntansi syariah sangat berbeda dengan gagasan yang mendasari praktik akuntansi konvensional, sehingga perlu penjelasan mengenai mengapa praktik akuntansi syariah di Indonesia berjalan seperti sekarang ini, bagaimana perlakuan-perlakuan terhadap aset, utang, dan kewajiban secara syariah, dan adakah model-model alternatif sebagai jawaban atas masalah-masalah yang muncul dalam praktik akuntansi syariah. Adanya tujuan-tujuan dalam akuntansi merupakan hal

penting yang ingin digugah. Terlebih hal ini berkaitan dengan tujuan akuntansi syariah, sebagai disiplin akuntansi yang merepresentasikan nilai-nilai spiritualitas ke-Tuhanan. Selain berangkat dari refleksifitas tersebut, tujuan (akuntansi) merupakan salah satu aspek terpenting yang menentukan bentuk tatanan bangunan teoretis -praktis akuntansi. Penempatan tujuan dalam konteks struktur teoretis merupakan pijakan penting pembentuk tatanan teori dan praktik akuntansi (Sitorus & Siregar, 2022). Lembaga keuangan syariah menjadikan nilai-nilai islam sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas akuntansi, mulai dari pengelolaan dana, penyajian laporan keuangan, hingga pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak sekadar menjadi alat administrasi keuangan, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah SWT serta kepada masyarakat.

Keuangan Islam melampaui sekadar serangkaian transaksi; ini adalah konsep yang mendalam, berlandaskan pada nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam. Dalam sistem ini, terdapat dedikasi yang kuat terhadap keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Keuangan Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian profit, tetapi juga berusaha untuk membangun ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan serta sesuai dengan norma-norma agama (Ardana & Sisdiyanto, 2024). Implementasi nilai-nilai islam pada lembaga keuangan syariah tercermin melalui penerapan prinsip amanah, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas keuangan dan pelaporan akuntansi. Penerapan tersebut bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan etika islam.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia memang cukup pesat, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya keseragaman dalam standar pelaporan keuangan, jumlah tenaga ahli yang memahami akuntansi syariah secara mendalam masih terbatas, serta perkembangan teknologi digital yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sistem syariah. Masalah-masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal akuntansi syariah dan penerapannya di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan studi yang lebih mendalam untuk mengkaji penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi, guna memastikan bahwa sistem keuangan Islam terus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan maqasid syariah.

KAJIAN TEORI

Secara umum teori merupakan kerangka pemikiran yang menekankan hubungan antara berbagai gagasan sehingga dapat membantu untuk memahami suatu fenomena. Teori akuntansi syariah dirancang untuk menjelaskan berbagai asumsi dasar yang menjadi fondasi praktik akuntansi syariah di Indonesia, serta menggambarkan praktik akuntansi yang ada dan memberikan dasar bagi pengembangan akuntansi syariah di masa depan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah, ayat 282, Islam menekankan pentingnya pencatatan transaksi yang akurat dan adil untuk menghindari kejadian di masa depan. Ayat ini menjadi dasar konsep akuntansi Islam yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatan ekonomi. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah, ayat 282, Islam menekankan pentingnya pencatatan transaksi yang akurat dan adil untuk menghindari kejadian di masa depan. Ayat ini menjadi dasar konsep akuntansi Islam yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatan ekonomi.

Memahami teori ini secara menyeluruh sangat penting untuk mendorong perkembangan praktik akuntansi menuju suatu metode yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, teori akuntansi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari akuntansi konvensional karena mengintegrasikan dimensi etika, spiritual, dan sosial dalam setiap proses pencatatan maupun pelaporan keuangan. Dari sudut pandang etimologis, istilah "Akuntansi Syariah" terdiri dari dua kata, yaitu "akuntansi" dan "syariah." Secara simpel, akuntansi dapat dipahami sebagai sistem pencatatan yang dikenal dengan sistem "double-entry" atau pencatatan ganda. Sistem ini mencakup perekaman di sisi debit dan kredit, di mana angka-angka yang dicatat merepresentasikan nilai ekonomi dari hak dan kewajiban atas aset (Ardana & Sisdianto, 2024). Implementasi akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah juga menuntut adanya kesesuaian antara praktik akuntansi dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK Syariah berfungsi sebagai pedoman untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah guna memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Standar-standar ini mencakup berbagai kontrak syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, dan wadiah. Dengan adanya PSAK Syariah, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang transparan, wajar, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan syariah serta kebutuhan pengguna laporan keuangan.

Penerapan akuntansi syariah sangat berkaitan dengan proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan hak serta kewajiban secara adil. Akuntansi syariah bukan hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, terutama dalam Surat AlBaqarah ayat 282. Ayat ini menegaskan kewajiban setiap mukmin untuk mencatat setiap transaksi yang belum sepenuhnya selesai, agar semua pihak memahami dengan jelas nilai dan waktu dari transaksi. Pencatatan yang tepat berfungsi untuk memastikan keadilan serta menghindari perselisihan, sehingga kehadiran saksi dalam setiap transaksi menjadi sangat penting (Ardana & Sisdianto, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi pada lembaga keuangan syariah. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, tantangan implementasi, dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta solusi yang dapat diterapkan dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, meliputi jurnal nasional dan internasional, prosiding seminar, buku referensi, regulasi, serta dokumen terkait akuntansi syariah dan lembaga keuangan syariah yang dipublikasikan pada periode 2022–2026. Proses pencarian literatur dilakukan melalui database Google Scholar, Garuda, SINTA, dan berbagai sumber ilmiah lainnya dengan menggunakan kata kunci "akuntansi syariah", "nilai-nilai Islam", "lembaga keuangan syariah", "transparansi", "akuntabilitas", "akad syariah", dan "pelaporan keuangan syariah".

Tahapan penelitian meliputi identifikasi literatur, seleksi literatur berdasarkan

relevansi topik dan tahun publikasi, evaluasi kualitas sumber, ekstraksi data, serta sintesis hasil penelitian. Dari literatur yang memenuhi kriteria inklusi, peneliti mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema utama, yaitu penerapan prinsip akuntansi syariah dalam lembaga keuangan syariah, tantangan implementasi akuntansi syariah, peran akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, implikasi penggunaan akad syariah terhadap struktur pelaporan keuangan, serta solusi dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip akuntansi syariah.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi temuan, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian, teori, dan regulasi yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih objektif, sistematis, dan sesuai dengan perkembangan praktik akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam lembaga keuangan syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) muncul sebagai pilihan penting bagi sebagian orang, terutama mereka yang setia pada nilai agama dan tidak mau berurusan dengan bank atau lembaga finansial tradisional. Penyebabnya adalah sistem bunga yang dipakai oleh lembaga konvensional sering dipandang bertentangan dengan prinsip Islam, yang mengharuskan adanya akad atau perjanjian yang bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), dan riba (bunga)(Ardana & Sisdiyanto, 2024). Penerapan prinsip syariah tersebut membuat lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap kegiatan transaksi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat tanpa merugikan salah satu pihak.

Akuntansi syariah memegang peranan penting dalam memastikan integritas dan kelangsungan operasional lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah beroperasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang tidak memperbolehkan adanya transaksi yang mengandung riba, gharar (ketidakpastian/ketidakjelasan) atau maysir. Oleh karena itu Tujuan utama akuntansi syariah adalah untuk memastikan bahwa praktik akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam(Kuswandari et al., 2025). Akuntansi syariah juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah melalui penyajian laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Penerapan prinsip ini membantu lembaga keuangan menjaga stabilitas operasional serta menciptakan sistem keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan: Data keuangan perlu disajikan secara terang, mudah diakses, dan dipahami oleh semua pihak yang memiliki kepentingan.
- 2) Kesetaraan: Setiap transaksi harus menunjukkan keadilan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat.
- 3) Tanggung jawab: Akuntan dan pengelola keuangan memiliki kewajiban penuh dalam mengelola dana yang dipercayakan kepada mereka.
- 4) Simplicity: Proses pencatatan dan pelaporan keuangan seharusnya sederhana, tetapi tetap cukup jelas untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
- 5) Larangan Bunga: Setiap transaksi yang dicatat harus bebas dari unsur bunga,

karena riba dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip Islam.

- 6) Penghilangan Ketidakjelasan dan Spekulasi: Semua transaksi harus dilakukan tanpa adanya ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan.
- 7) Responsabilitas: Akuntansi syariah tidak hanya memikul tanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah SWT dan masyarakat secara umum.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, akuntansi syariah berkomitmen untuk menciptakan keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.

Tantangan dalam implementasi

Salah satu masalah yang dihadapi adalah tidak adanya konsistensi dalam standar dan regulasi. Perbedaan dalam standar akuntansi syariah antara negara-negara menimbulkan keraguan dalam laporan keuangan. Meskipun terdapat upaya untuk menyamakan melalui AAOIFI dan IFRS, perbedaan ini masih menghalangi penerapan praktik yang seragam. Selain itu, penerapan prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba dan gharar, juga membutuhkan penafsiran yang rumit. Keterlibatan para ulama syariah menjadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan. Adanya hambatan dalam standarisasi dan kompleksitas penafsiran prinsip syariat tersebut memicu munculnya berbagai kendala teknis, diantaranya :

- 1) Tantangan Peraturan dan Standar Akuntansi

Salah satu masalah besar dalam implementasi akuntansi syariah adalah adanya kekurangan peraturan yang jelas dan konsisten, baik di tingkat internasional maupun domestik. Di banyak negara, peraturan mengenai akuntansi syariah masih sangat minim, dan adanya perbedaan standar di berbagai negara dapat menimbulkan kebingungan. Ketidakpastian ini menghambat penerapan teknologi digital yang membutuhkan kerangka kerja yang lebih kuat agar bisa diterapkan dengan baik.

- 2) Keterbatasan Pengetahuan dan Skill Praktisi

Banyak praktisi di bidang akuntansi syariah menemui kendala dalam memahami dan menguasai teknologi digital yang terus berubah. Meskipun penggunaan teknologi ini semakin umum, masih banyak profesional di sektor ini yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penggunaan software serta alat digital yang dapat meningkatkan produktivitas mereka.

- 3) Ketidakpastian juga menghinggapi penerapan teknologi digital Seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan big data dalam akuntansi syariah.

Meski teknologi-teknologi tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, muncul tantangan terkait bagaimana cara pengintegrasian dalam konteks syariah. Banyak pihak yang masih meragukan apakah penggunaan teknologi seperti blockchain dalam transaksi syariah layak, terutama karena beberapa aspek teknisnya belum sepenuhnya dapat dipastikan sesuai dengan hukum Islam.

Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi Islam tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan lembaga keuangan Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jika hambatan-hambatan ini tidak segera diatasi, tujuan menciptakan sistem keuangan yang transparan, adil, dan sesuai dengan syariah melalui

akuntansi syariah akan sulit dicapai secara optimal.

Fenomena meningkatnya kebutuhan dana dari usaha kecil dan menengah khususnya pedagang kaki lima yang mengalami kesulitan dalam mengikuti tata cara memperoleh pinjaman di perbankan, maka hal ini menjadi perhatian utama bagi lembaga keuangan syariah (LKS), khususnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT) menerbitkan keuangan mudharabah untuk memberikan wadah kepada pedagang kaki lima (mudharib).

Tujuan pembiayaan Mudharabah yang Implementasi Akuntansi Syariah pada Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dalam Praktik Keuangan Modern diberikan Baitul Mal Wa Tamwil adalah untuk meningkatkan kinerja UMKM yang dijalankan nasabahnya. Hal ini terlihat dari beberapa faktor seperti keberhasilan bisnis pelanggan melalui peningkatan pendapatan dan lamanya eksistensi perusahaan. Pinjaman mudharabah dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena nasabah yang menjalankan usahanya mengandalkan pinjaman mudharabah untuk menjalankan usahanya. Baitul mal wa tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil dan mengembangkan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin dan melindungi kepentingan mereka (Aminarti & Firdaus, 2024). Dengan adanya pembiayaan mudharabah tersebut, pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha tanpa terbebani sistem bunga, sehingga kegiatan usaha dapat berkembang secara lebih adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Peningkatan Tranparansi Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Transparansi adalah landasan utama yang mendorong para pelaku ekonomi untuk senantiasa jujur dan akurat dalam menyajikan laporan aset dan pendapatan mereka. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan ketersediaan informasi di setiap lini kegiatan ekonomi, semuanya harus selaras dengan kaidah Islam. Dengan adanya keterbukaan ini, pelaku ekonomi didorong untuk menyajikan laporan yang jelas, tepat, dan detail mengenai seluruh aset, pendapatan, pengeluaran, serta bagaimana mereka menjalankan bisnis (Kuswandari et al., 2025). Dengan demikian, transparansi tersebut juga berarti berbagi informasi penting kepada para pihak yang membutuhkan. Transparansi pada lembaga keuangan syariah memiliki beberapa aspek diantaranya :

- 1) **Pelaporan Keuangan**
Pelaku ekonomi Muslim diharapkan menyusun laporan keuangan yang benar dan terpercaya, yang secara tepat menggambarkan kondisi keuangan, kinerja, dan aliran kas mereka. Laporan ini harus patuh pada prinsip akuntansi syariah dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami serta dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
- 2) **Pembukaan Informasi**
Transparansi dalam konteks ini mewajibkan pengungkapan informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ini meliputi detail mengenai struktur kepemilikan, metode pengelolaan risiko, serta kebijakan sosial dan lingkungan yang diterapkan oleh entitas atau lembaga ekonomi Islam.
- 3) **Pemantauan dan Pemeriksaan**
- 4) **Aspek transparansi juga meliputi pengawasan dan audit yang ketat terhadap**

segala aktivitas ekonomi. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan. Adanya pengawasan dan audit yang independen sangat membantu dalam menjaga integritas laporan keuangan dan praktik bisnis yang dijalankan.

Transparansi dalam akuntansi syariah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam. Semakin transparan penyajian laporan keuangan, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas lembaga tersebut dalam melaporkan pengelolaan dana kepada publik dan kepada Allah SWT.

Implikasi Implementasi Akad terhadap Struktur Pelaporan Keuangan

Keberagaman jenis akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah berimplikasi pada kompleksitas struktur laporan keuangan yang harus disusun. Laporan posisi keuangan bank syariah harus menyajikan secara terpisah aset dan kewajiban yang terkait dengan berbagai jenis akad, seperti piutang murabahah, investasi mudharabah dan musyarakah, aset ijarah, serta liabilitas yang terkait dengan penghimpunan dana dari nasabah menggunakan akad wadiah atau mudharabah (Pratama et al., 2026). Selain itu, Implementasi akad syariah juga menuntut adanya transparansi dan ketepatan dalam pengakuan pendapatan, pembagian hasil usaha, serta pencatatan risiko pada setiap jenis transaksi agar laporan keuangan bank syariah secara akurat dan sesuai prinsip syariah. Implementasi berbagai jenis akad dalam lembaga keuangan syariah menyebabkan struktur pelaporan keuangan menjadi lebih kompleks karena setiap akad memiliki karakteristik pencatatan dan penyajian yang berbeda (Rosyidah, 2025). Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun secara terpisah dan rinci agar informasi mengenai aset, kewajiban, pendapatan, serta pembagian hasil dari masing-masing akad dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Solusi yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah

Penerapan prinsip akuntansi syariah merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan prinsip tersebut, baik dari aspek sumber daya manusia, pemahaman masyarakat, teknologi, maupun regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan berbagai solusi yang tepat dan berkelanjutan agar penerapan akuntansi syariah dapat berjalan secara optimal dan mampu mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, berbagai hambatan yang muncul perlu diatasi melalui langkah-langkah strategis dan berkelanjutan. Solusi yang dilakukan harus melibatkan aspek sumber daya manusia, sistem, regulasi, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat. Dengan adanya solusi yang tepat, penerapan akuntansi syariah diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Pratiwi & Suhatmi, 2025).

KESIMPULAN

Bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi di lembaga

keuangan Islam memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel. Nilai-nilai seperti kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan akuntabilitas menjadi dasar utama pencatatan dan penyusunan laporan keuangan Islam. Penggunaan akad syariah juga menentukan struktur pencatatan keuangan, yang mana hal ini menuntut penyajian laporan yang lebih rinci dan ditentukan dengan prinsip syariah. Namun, penerapan akuntansi Islam masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang tidak konsisten, dan tantangan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan akuntansi Islam dan mendukung pencapaian maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminarti, N., & Firdaus, R. (2024). Implementasi Akuntansi Syariah pada Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dalam Praktik Keuangan Modern. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(4).
- Ardana, D. A., & Sisdiyanto, E. (2024). Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(12).
- Kuswandari, N., Hadiansyah, P. S., & Andini, T. P. (2025). Kontribusi penerapan akuntansi syariah terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga keuangan syariah. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 237–242.
- Pratama, R., Majid, J., Bulutoding, L., & Hafizuddin, H. (2026). Implementasi Akad dan Implikasinya terhadap Sistem Tata Kelola Akuntansi Syariah. *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah*, 4(1), 37–48.
- Pratiwi, M. A., & Suhatmi, E. C. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Penyusunan. *Seminar Nasional & Call For Paper Hubsintek 2025*, 215–223.
- Rosyidah, S. (2025). Perkembangan dan Implementasi Akuntansi Syariah di Indonesia : Tinjauan Literatur atas Tantangan , Peluang , dan Dampaknya. *Ecodemica : Jurnal Ekonomi , Manajemen Dan Bisnis*, 9(2), 88–98.
- Sappo, S., Rahmadani, A., & Vebriyanti, D. (2026). Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah. *Journal Of Society And Bussiness*, 2(2), 257–265.
- Siregar, B. G. (n.d.). Implementasi Akuntansi dalam Kehidupan Menurut perspektif islam. 1–16.
- Sitorus, A. P., & Siregar, S. (2022). Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 806–814.